



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

---

Tahun Sidang	: 2011 – 2012
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke-
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Rabu, 25 Januari 2012
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.50 WIB s.d 17.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: 1. Evaluasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman serta rumah susun; 2. Penerapan UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Penerapan UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.
Ketua Rapat	: Ir. H. Mulyadi
Sekretaris	: Hippi Hidayati, SE
Hadir Anggota	: dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat, DPP REI, DPD REI DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kadis DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, beserta jajaran terkait lainnya.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pukul 10.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat, Kadis DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DPP REI, DPD REI DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan, pada hari ini adalah untuk membahas evaluasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman serta rumah susun; penerapan UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan penerapan UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.
3. Ketua mempersilakan kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat, Kadis DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Ketua Umum DPP REI untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera meningkatkan kuantitas dan kualitas sosialisasi UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) pusat dan daerah, serta segera menyelesaikan semua ketentuan peraturan pelaksanaan (PP, Perpres, Permen, Kepmen).
2. Terkait semakin mendesaknya kehadiran badan pelaksana rumah susun untuk mengatasi permasalahan operasional, Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah tentang badan pelaksana rumah susun, sesuai amanat dari Undang-undang tentang Rumah Susun.
3. Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk segera menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan untuk menangani pembangunan perumahan dan permukiman sesuai amanat UU tentang Perumahan dan kawasan Permukiman.
4. Komisi V DPR RI meminta Pemerintah untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, baik vertikal maupun horisontal guna menyesuaikan peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu kepada UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
5. Komisi V DPR RI meminta Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proyek percontohan penanganan kawasan permukiman kumuh di lokasi yang akan disepakati bersama dengan melibatkan REI dan APERSI.
6. Untuk mendapatkan gambaran komprehensif, Komisi V DPR RI dan Pemerintah, pemerintah daerah, REI serta APERSI, akan melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa kawasan perumahan dan permukiman serta rumah susun, yang lokasi dan waktunya ditentukan kemudian.
7. Komisi V DPR RI melalui pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, meminta agar pemerintah kabupaten/kota melaksanakan sanksi, apabila terbukti merugikan konsumen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Guna menyelesaikan permasalahan tingkat hunian Rumah Susun yang sangat rendah dan status aset yang belum jelas, Komisi V DPR RI sepakat untuk melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama.

### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

**DIRJEN CIPTA KARYA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

ttd

**IR. BUDI YUWONO PS, DIPL.SE**

**DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL  
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT,**

ttd

**IR. PANGIHUTAN MARPAUNG**

Jakarta, 25 Januari 2012  
**KETUA RAPAT,**

ttd

**IR. H. MULYADI**

**KETUA UMUM DPP REI,**

ttd

**IR. SETYO MAHARSO**

Jakarta, 31 Januari 2011,  
**KETUA RAPAT,**

**DRS. YOSEPH UMARHADI, MSI, MA**

**MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL**

**IR. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI**

Jakarta, 21 September 2010

**KETUA RAPAT,**

**IR. H. MULYADI**

**MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL**

**MENTERI NEGARA  
PERUMAHAN RAKYAT**

**K E T U A,**

**IR. A. HELMY FAISHAL ZAINI, SE**

**SOEHARSO MONOARFA, MA**

**.....**

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

**KEPALA BADAN  
SAR NASIONAL,**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN  
LUMPUR SIDOARJO,**

**DR. IR. SRI WORO B. HARIJONO, MSC**

**MARSDYA. WARDJOKO**

**SOENARSO**

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT,



DRS. SOEROYO ALIMOESO

KETUA RAPAT,

DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT,

DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA,

SUNARYO, SH

IR. HARRY BAKTI SINGAYUDA, MM

DIRJEN BINA MARGA,

DIRLANTAS MABES POLRI,

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

IR. DJOKO MURJANTO, M.Sc

DRS. DJOKO SUSILO, SH, MSi

MARSDYA. WARDJOKO

